|  |
| --- |
| Photo displaying partial image of two pie charts on a canvas-textured page |
| RENCANA STRATEGIS 2017-2022  BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Menimbang pesatnya perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, maka sudah seharusnya pemerintah memperbaiki cara kerja dalam memberikan hasil yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dimulai dari proses penentuan rencana-rencana yang baik yang bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi memerlukan kemampuan untuk melaksanakan, mengharmonisasikan, dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi tahun 2012-2017, sumber daya dan potensi yang dimiliki serta isu-isu strategis yang berkembang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi merupakan sebuah SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Cimahi, untuk itu harus menetapkan Visi dan Misi SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017-2022 serta menunjang kepada tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana strategis tersebut merupakan sebuah instrumen/dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai acuan kerja SKPD agar lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Mengingat pentingnya peranan renstra SKPD bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai urusan penunjang di bidang keuangan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu (2017-2022), maka disusunlah Renstra SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

**1.2. Maksud dan Tujuan**

**Maksud** penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai dokumen perencanaan pengelolaan belanja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan acuan / pedoman dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Cimahi dari tahun 2017-2022.

**Tujuan** penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Cimahi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

Dalam proses penyusunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam kurun waktu Tahun 2005-2025 dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Cimahi, selai itu juga dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2018. Berikut ini digambarkan bagaimana hubungan antara RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya :

**Gambar 1.1 Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan**

Pedoman diacu

**RPJPN**

**RPJPD**

20 thn 20 thn

5 thn pedoman diperhatikan pedoman pedoman

**RPJMN**

**RENSTRA SKPD**

**RPJMDD**

5 thn 5 thn 5 thn

**RENSTRA K/L**

pedoman dijabarkan dijabarkan

**RENJA SKPD**

**RKP**

**RKPD**

diacu diserasikan diacu pedoman

**RENJA K/L**

1 thn 1 thn

**Dibahas bersama DPRD**

1 thn 1 thn

**PPAS**

**KUA**

**NOTA KESEPAKATAN PIMP. DPRD dgn KDH**

Keterangan Gambar :

**RKA SKPD**

**Pedoman Peny.RKA SKPD**

1. KUA : Kebijakan Umum APBD
2. PPAS : Prioritas Pagu Anggaran Sementara
3. RKA : Rencana Kerja dan Anggaran
4. TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

**TAPD**

**RAPERDA APBD**

**1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi 2005-2025; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi 2017-2022; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 228 Tahun 2018);
14. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

**1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi**

**Kedudukan** Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaan daerah merupakan suatu bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahi meliputi belanja dan pengelolaan aset daerah untuk mensinergiskan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJP, RPJMD, RKPD, RTRW dan Renstra SKPD yang ditetapkan dalam Perda Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

**Peranan** Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaan daerah menunjang teroptimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung tercapainya indikator kunci pemerintah kota di bidang keuangan daerah yang diantaranya sebagai berikut :

1. Opini BPK
2. Presentase SILPA
3. Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Serta mendukung terciptanya optimalisasi aset daerah seperti rekomendasi yang tergambar dalam kondisi keuangan daerah pada Bab II dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahuin 2017-2022.

**1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan dokumen rencana strategis BPKAD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3 PERMASALAHAN Dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

5.1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Cimahi

5.2. Program dan kegiatan lintas SKPD

5.3. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Bab 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab 8 PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, menjelaskan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

* BPKAD mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang Daerah kota.

Sementara itu fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

* Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
* Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
* Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
* Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan;
* Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu dijelaskan kembali tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktural dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi BPKAD Kota Cimahi

Tahun 2017



**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pegawai PNS | : | 40 orang |
| 2. | Pegawai THL | : | 6 orang |
|  | Jumlah Pegawai |  | 46 orang |

*Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Cimahi 2017*

Laki-laki : 26 orang

Perempuan : 20 orang

Adapun Rincian Pegawai PNS di Lingkungan BPKAD antara lain :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Golongan | Jumlah Pegawai |
| 1 | IV B | 1 orang |
| 2 | IV A | 3 orang |
| 3 | III D | 6 orang |
| 4 | III C | 4 orang |
| 5 | III B | 12 orang |
| 6 | III A | 8 orang |
| 7 | II D | 3 orang |
| 8 | II C | 3 orang |
|  | Total Jumlah PNS | 40 orang |

*Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Cimahi 2017*

Latar belakang pendidikan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2017:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Jurusan** | **Jumlah Orang** |
| 1. | Magister (S2) | Magister Akuntansi | 5 orang |
| Magister Sains | 2 orang |
| Magister Administrasi Publik | 1 orang |
| Magister Teknik | 1 orang |
| 2. | Sarjana (S1) | Ekonomi Akuntansi | 4 Orang |
| Ekonomi Manajemen | 6 orang |
| Sosial | 6 Orang |
| Administrasi Negara | 1 Orang |
| Administrasi Bisnis | 1 Orang |
| Sarjana Ilmu Komunikasi | 1 Orang |
| 3. | Diploma 3 (DIII) | Akuntansi | 2 orang |
| Perpajakan | 1 orang |
| Ilmu Pemerintahan | 1 orang |
| Teknik Komputer | 2 orang |
| 4. | SMA | Sosial | 3 orang |
| 5. | SMK | Teknik | 1 orang |
| **JUMLAH** | | | 40 orang |

*Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Cimahi 2017*

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKAD Kota Cimahi dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (paperless office) dan ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



**2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

* 1. Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran (SIPKD) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
  2. Pelaksanaan Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
  3. Penatausahaan dan Pelaporan Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Cimahi yaitu Bank BJB Cabang Cimahi. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi komputer SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga diberi amanah untuk mengelola seluruh aset daerah di Kota Cimahi. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset dan kedepan akan dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi geografis manajemen aset (SIG-AsetCimahi). Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.

Badan pengelola keuangan dan aset daerah berdiri pada Tanggal 31 Desember Tahun 2015, sebagai penggabungan antara bagian keuangan dan bagian perlengakapan yang berada dibawah Sekretariat Daerah. Dengan demikian kinerja pelayanan BPKAD dapat dilihat dari dua sisi pada saat tiga tahun pertama sebagai bagian keuangan dan aset daerah serta sisa dua tahun terakhir sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tergambar kedalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD

KOTA CIMAHI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD  (SUMBER DARI INDIKATOR SASARAN) JIKA LEBIH DARI SATU INDIKATOR MAKA DIAGREGATKAN | Program/kegiatan | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | | | | | | |
| SASARAN 5 TAHUN SEBELUMNYA (JIKA ADA REVISI MAKA DIHITUNG BERDASARKAN SEMULA DENGAN INDIKATOR SEMULA DAN SESUDAH DENGAN INDIKATOR SESUDAH. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | |
| 1. | Peningkatan kualitas administrasi kesekretariatan | Jumlah orang aparatur pengelola keuangan yang mengikuti pendidikan /pelatih | 1. peningkatan sumberdaya asparatur |  |  |  |  |  |  |  | 3 angkatan , 45 0rang |  |  |  |  | 3 angkatan , 45 0rang  (100%) |  |  | | |  | | |  | | 100% |
| 2.penyusunan laporan capaian keuangan dan ikhtisar realisasi keuangan |  |  |  |  |  |  | I kali |  |  |  |  | 1 kali  (100%) |  |  |  | | | |  | | 100% | |  |
| Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar oprasional | 1. pengadaan kendaraan dinas /oprasional |  |  |  |  |  |  | 1 jeep, 9 unit motor | 4 jeep, 2 pick up, 1mpv |  |  |  | 1 jeep, 9 unit motor  (100%) | jeep, 2 pick up, 1mpv  (100%) |  |  | | | |  | | 96,8% | | 94,44% |
| 2. pengadaan mebeleur |  |  |  |  |  |  | 2 paket  ,  10 meja, 20 kursi | 2 paket,  10 meja, 20 kursi |  |  |  | 2 paket  ,  10 meja, 20 kurs  (100%) | 2 paket,  10 meja, 20 kursi  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 3. pengadaan sarana dan Prasarana pendukung pemerintahan |  |  |  |  |  |  | 5 rak  ,5 gudang | 5, gudang |  |  |  | 5 rak  ,5 gudang  (100% | 5, gudang  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 4. peningkatan sarana dan prasarana asparatur |  |  |  |  |  |  | 10 komputer, 5 laptop, 10,  2 LCD Big, 1 papan tulis elektrik, 1 mesin fotocopy,  I unit kulkas | 5 komputer,  1 LCD big , |  |  |  | 10 komputer, 5 laptop, 10,  2 LCD Big, 1 papan tulis elektrik, 1 mesin fotocopy,  I unit kulkas  (100%) | 5 komputer,  1 LCD big ,  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional |  |  |  |  |  |  | 8 unit kendaraan roda 4,  9 unit kendaraan | 8 unit kendaraan roda 4,  9 unit kendaraan |  |  |  | 15 unit kendaraan (80%) | 8 unit kendaraan roda 4,  9 unit kendaraan  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 6. pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung |  |  |  |  |  |  | 1 gedung |  |  |  |  | 1 gedung  (100%) |  |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 7. Pemeliharaan rutin / berkala mebeuleur |  |  |  |  |  |  | 3 jenis | 3 jenis |  |  |  | 3 jenis  (100%) | 3 jenis  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 8. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor |  |  |  |  |  |  | 18 unit, 10 jenis | 28 unit,  5 jenis |  |  |  | 18 unit, 10 jenis  (100%) | 28 unit,  5 jenis  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 9. penyedia jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik |  |  |  |  |  |  | 1 langganan telepon, 1 langganan internet, 2 rekening | 1 langganan telepon, 1 langganan internet, 2 rekening |  |  |  | 2  (67%) | 1 langganan telepon, 1 langganan internet, 2 rekening  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 10. penyedia jasa jaminan barang milik daerah |  |  |  |  |  |  | 17 polis asuransi kendaraan | 17 polis asuransi kendaraan |  |  |  | 17 polis asuransi kendaraan  (100%) | 17 polis asuransi kendaraan  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 11. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan, kendaraan dinas/ oprasional |  |  |  |  |  |  | 8 stnk roda 4, 9 stnk roda 2 | 8 stnk roda 4, 9 stnk roda 2 |  |  |  | 8 stnk roda 4, 9 stnk roda 2  (100%) | 8 stnk roda 4, 9 stnk roda 2  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 11. Penyediaan jasa administrasi keuangan |  |  |  |  |  |  |  | 2 dokumen |  |  |  |  | 2 dokumen  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 12. penyedia alat tulis kantor |  |  |  |  |  |  | 85 jenis ATK | 85 Jenis ATK |  |  |  | 80  Jenis ATK  (100%) | 85 Jenis ATK  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  |  |  |  |  |  | 7 jenis, 4 buku | 7 jenis |  |  |  | 10  (95%) | 7 jenis  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 14. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  |  |  |  |  |  | 3 media cetak, 10 buku peraturan | 3 media cetak, 10 buku peraturan |  |  |  | 3 media cetak, 10 buku peraturan  (100%) | 3 media cetak, 10 buku peraturan  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 15. penyediaan barang logistik kantor |  |  |  |  |  |  | 12 jenis peralatan | 12 jenis peralatan |  |  |  | 12 jenis peralatan (100%) | 12 jenis peralatan (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 16. penyediaan makanan dan minuman |  |  |  |  |  |  | 600 orang | 1000 orang |  |  |  | 600 orang  (100%) | 1000 orang  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 17. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  |  |  |  |  |  | 50 kali luar daerah, 20 kali dalam daerah | 50 kali luar daerah, 20 kali dalam daerah |  |  |  | 50 kali luar daerah, 20 kali dalam daerah  (100%) | 50 kali luar daerah, 20 kali dalam daerah  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 18. Penyediaan jasa Tenaga pendukung Administrasi Teknis dan perkantoran |  |  |  |  |  |  | 5 orang THL | 4 orang THL |  |  |  | 5 orang THL  (100%) | 4 orang THL  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 2. | Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berkualitas | Jumlah Pernebitan SP2D | 1. Kegiatan peningkatan pelayanan penatausahaan dan pembendaharaan |  |  |  |  |  |  |  | 12 kali,  5500 buah SPP, SPM, SP 2D,  500 Pegawai  1 paket |  |  |  |  | 12 kali,  5500 buah SPP, SPM, SP 2D,  500 Pegawai  1 paket(100%) |  |  | | | |  | |  | | 100% |
| Jumlah SKPD Menyusun RKA/ RKPA | 1. Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD |  |  |  |  |  |  | 3 jenis dokumen, 200 buah  1 sosialisasi  4, tahapan, | 3 jenis dokumen, 200 buah  1 sosialisasi  4, tahapan |  |  |  | 3 jenis dokumen, 200 buah  1 sosialisasi  4, tahapan  (100%) | 3 jenis dokumen, 200 buah  1 sosialisasi  4, tahapan  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 2. Penyusunan Rancangan KHD tentang Penjabaran APBD |  |  |  |  |  |  | 1 jenis  150 buah | 1 jenis 150 buah |  |  |  | 1 jenis  150 buah  (100%) | 1 jenis  150 buah  (100%) |  |  | | | |  | |  | |  |
| 3. Penyusunan Rancangan Perda Tentang perubahan APBD |  |  |  |  |  |  | 3 jenis dokumen, 400 buah  1 sosialisasi  4 tahapan | 3 jenis dokumen, 400 buah  1 sosialisasi  4 tahapan |  |  |  | 3 jenis dokumen, 400 buah  1 sosialisasi  4 tahapan  (100%) | 3 jenis dokumen, 400 buah  1 sosialisasi  4 tahapan (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 4. Penyusunan rancangan Peraturan KHD tentang Penjabaran Perubahan APBD |  |  |  |  |  |  | 2 jenis dokumen  350 buah | 2 jenis dokumen  350 buah |  |  |  | 2 jenis dokumen  350 buah  (100%) | 2 jenis dokumen  350 buah  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| Jumlah Penerbitan SPD Tepat Waktu | 1. Pengendalian Anggaran |  |  |  |  |  |  | 3 jenis laporan  30 buku | 3 jenis laporan  30 buku |  |  |  | 3 jenis laporan  30 buku  (100%) | 3 jenis laporan  30 buku  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| Pengumpulan Bahan dan Data kebutuhan penyusunan laporan tepat waktu | 1. Penyusunan laporan keuangan sementara |  |  |  |  |  |  | 1 jenis laporan  50 buah | 1 jenis laporan  100 buah |  |  |  | 1 jenis laporan  50 buah  (100%) | 1 jenis laporan  100 buah  (100%) |  |  | | | |  | | !00% | | 100% |
| Jumlah SKPD Menyampaikan laporan keuangan | 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun |  |  |  |  |  |  | 3 jenis laporan  350 buah  2x bimtek | 2 jenis laporan  200 buah |  |  |  | 3 jenis laporan  350 buah  2x bimtek  (100%) | 2 jenis laporan  200 buah  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| Penyampaian bahan dan data penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD | 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD |  |  |  |  |  |  | 2 jenis laporan, 400 buah | 3 jenis laporan , 700 buah |  |  |  | 2 jenis laporan, 400 buah  (100%) | 3 jenis laporan , 700 buah  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 2. Penyusunan rancangan penjabaran peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD |  |  |  |  |  |  | 1 jenis laporan  300 buah | 1 jenis laporan, 300 buah |  |  |  | 1 jenis laporan  300 buah  (100%) | 1 jenis laporan, 300 buah  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Informasi Dokumen Keuangan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan keuangan daerah | 1. Penyusunan standar satuan harga |  |  |  |  |  |  | 1 jenis dokumen  150 buah | 1 jenis dokumen  150 buah |  |  |  | 1 jenis dokumen  150 buah  (100%) | 1 jenis dokumen  150 buah  (100%) |  |  | | | |  | | 40% | | 100% |
| 2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah |  |  |  |  |  |  |  | 1 jenis 150 buah |  |  |  |  | 1 jenis 150 buah  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 3. Peningkatan manajemen investasi daerah |  |  |  |  |  |  | 1 jenis |  |  |  |  |  | (0%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 4. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah |  |  |  |  |  |  |  | 1 kajian  1 aplikasi |  |  |  |  | 1 kajian  1 aplikasi  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 5. sinergitas penganggaran dan pelaporan bantuan keuangan |  |  |  |  |  |  | 3x sosialisasi | 1 dokumen |  |  |  | 3x sosialisasi  (100%) | 1 dokumen (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 100% |
| 4 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Aset tanah yang tersertifikasi | 1. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang daerah |  |  |  |  |  |  | 40 sertifikat  3 paket  1 jenis  100 buku  250 orang | 30 sertifikat  3 paket  1 jenis 100 buku |  |  |  | 9 | 3 sertifikat  3 paket  1 jenis 100 buku  (100%) |  |  | | | |  | | 40% | | 10% |
| Jumlah penghapusan Barang milik daerah | 1. Penghapusan Barang Milik Daerah |  |  |  |  |  |  | 1 paket | 4x penilaian dan penghapusan |  |  |  | 1 paket | 2x  Penilaian  3 x penghapusan  (100%) |  |  | | | |  | | 100% | | 50 % |
| Jumlah Pemeliharaan Barang milik daerah | 1. Pemanfaatan aset Daerah |  |  |  |  |  |  | 1 jenis |  |  |  |  | 1 jenis |  |  |  | | | |  | | 100% | |  |
| 2. Pemanfaatan Barang milik daerah |  |  |  |  |  |  |  | 1 jenis |  |  |  |  | 1 jenis |  |  | | | |  | |  | | 100% |
| Jumlah Kendaraan dinas dan oprasional yang masuk masa penyusutan | 1. optimasi aset daerah |  |  |  |  |  |  |  | 1 jenis |  |  |  |  | 1 jenis |  |  | | | |  | |  | | 100% |
| 5. | Monitoring dan Evaluasi Terukur dan efektif | Persentase Penyerapan DPA | 1. sistem informasi Pengelolaan keuangan daerah |  |  |  |  |  |  | 2 paket  2 jenis, 200 buah  2 kali 5 orang  5 angkatan ,2 kali | 2 paket  2 jenis, 200 buah  2 kali 5 orang  5 angkatan ,2 kali |  |  |  | 174  (80%) | 2 paket  2 jenis, 200 buah  2 kali 5 orang  5 angkatan ,2 kali  (100%) |  |  | | | |  | | 80% | | 100% |
| Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu | 1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |  |  |  |  |  |  | 25 jenis,  440 buah | 28 jenis,  490 buah |  |  |  | 465  (100%) | 469  (90%) |  |  | | | |  | | 100% | | 90% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |  |

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan**

**Sekretariat Daerah Kota Cimahi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja sesuai Fungsi PD** | **Target NPSK** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra PD Tahun Ke-** | | | | | **Realisasi Capaian Tahun Ke-** | | | | | **Rasio Capaian Tahun Ke-** | | | | |
| **1 (2013)** | **2 (2014)** | **3 (2015)** | **4 (2016)** | **5 (2017)** | **1 (2013)** | **2 (2014)** | **3 (2015)** | **4 (2016)** | **5 (2017)** | **1 (2013)** | **2 (2014)** | **3 (2015)** | **4 (2016)** | **5 (2017)** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 48 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah |  |  |  |  | 1.617.013.400 | 1.025.814.000 |  |  |  | 877.593.718 | 606.696.465 |  |  |  | 54% | 59% |  |  |
| 49 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD |  |  |  | 244.796.800 | 135.669.517 | 140.769.000 |  |  | 241.994.950 | 119.460.100 | 138.817.750 |  |  | 99% | 88% | 99% |  |  |
| 50 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD |  |  |  | 154.295.850 | 98.664.000 | 161.768.000 |  |  | 152.751.500 | 91.838.240 | 147.941.400 |  |  | 99% | 93% | 91% |  |  |
| 51 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD |  |  |  | 38.197.900 | 40.140.000 | 29.375.000 |  |  | 37.948.650 | 40.140.000 | 29.375.000 |  |  | 99% | 100% | 100% |  |  |
| 52 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD |  |  |  | 70.196.100 | 27.720.000 | 32.150.000 |  |  | 68.206.150 | 27.571.852 | 32.109.500 |  |  | 97% | 99% | 100% |  |  |
| 53 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |  |  |  | 150.072.350 | 75.308.400 | 66.125.000 |  |  | 148.542.535 | 74.312.599 | 66.104.750 |  |  | 99% | 99% | 100% |  |  |
| 54 | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah |  |  |  | 432.519.000 | 1.014.670.000 | 1.008.669.000 |  |  | 415.887.505 | 990.274.110 | 999.884.075 |  |  | 96% | 98% | 99% |  |  |
| 55 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |  |  |  | 130.014.000 | 88.701.000 | 69.719.000 |  |  | 128.195.070 | 87.772.099 | 69.487.250 |  |  | 99% | 99% | 100% |  |  |
| 56 | Pengendalian Anggaran |  |  |  | 183.676.943 | 84.388.750 | 63.743.750 |  |  | 178.831.050 | 77.774.340 | 55.493.750 |  |  | 97% | 92% | 87% |  |  |
| 57 | Sinergitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan |  |  |  | 14.527.575 | 10.380.200 | 12.050.000 |  |  | 12.330.000 | 9.977.700 | 10.167.600 |  |  | 85% | 96% | 84% |  |  |

Berdasarkan gambaran di atas terlihat secara umum tingkat capaian kinerja perangkat daerah baik sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun pada saat terpisah menjadi bagian keuangan dan bagian perlengkapan Setda Kota Cimahi, yang menjadi titik lemah pencapaian kinerja di sektor pengelolaan aset daerah pada tahun 2014 dan 2015 hanya berkisar antara 54-59% yang tertuang dalam satu kegiatan manajemen aset, hal ini disebabkan kewenangan pengelolaan aset pada saat menjadi bagian masih terbatas dan dukungan sumber daya manusia yang kurang, sehingga pada Tahun 2016 setelah terbentuk BPKAD terdapat beberapa perubahan yang dimulai dengan penambahan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas pengelolaan barang milik daerah, namun dikarenakan masih terdapat berbagai persoalan aset di masa lalu yang belum terinventarisasi secara utuh, menyebabkan beberapa pencapaian kegiatan tidak maksimal seperti pencapaian sertifikasi tanah hanya berkisar 10%-40% dari target hal ini disebabkan kurangnya kordinasi dengan BPN dikarenakan banyak fokus pekerjaan BPN Menyelesaikan target sertifikat gratis nasional, selain itu kesalahan penetapan target pada kegiatan penghapusan barang milik daerah sehingga kurang tepat dalam mengukur hasil kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2016 seharusnya bukan per paket namun dijabarkan antara penghapusan dan penilaian.

Dalam sisi yang berbeda aspek pengelolaan keuangan sudah tercapai dengan baik dimana semenjak tahun 2012 penetapan APBD selalu tepat waktu dan pelaporan keuangan selalu mendapat opini WTP, sehingga hal ini perlu untuk dipertahankan secara kinerja, namun dengan adanya sub bidang perencanaan aset yang menepel pada bidang anggaran, hal ini menjadikan satu tantangan untuk mensinergikan perencanaan aset dan perencanaan anggaran sehingga dibutuhkan kegiatan yang mendukung sinergi dua unsur tersebut.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN**

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi selama periode 2016-2017 serta pada saat terpisah sebagai bagian keuangan dan bagian perlengkapan selama periode 2012-2015 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.5 tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas dan penyempurnaan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;
2. Masih terdapat kesulitan pencapaian target invetarisasi data aset seutuhnya dari sisi aspek legal pensertfikasian tanah serta pemilahan data extracountable barang yang tidak termasuk kelompok data aset tetap

**BAB III**

**PERMASALAHAN Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada awalnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yaitu bagian keuangan dan bagian perlengkapan sebagaimana adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2015 yang meleburkan kedua bagian tersebut menjadi suatu Badan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kebijakan tersebut menentukan arah dari tata kelola keuangan dan aset daerah bagi keseluruhan SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD adalah sebagai berikut :

* + - 1. Persoalan yang terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja di BPKAD eksiting diantaranya postur organisasi yang ramping dengan wewenang yang luas, sehingga bagian perencanaan aset masih tergabung kedalam bidang anggaran, hal ini menyebabkan beberapa penyelesaian pekerjaan yang kurang optimal, sedangakan bidang anggaran dalam porsi ideal perlu ditopang minimal dua sub bidang yaitu perencanaan dan pengendalian agar terdapat monitoring pencapaian anggaran terutama anggaran kas yang selama ini tertuang dalam kegiatan yang penyelesaianya belum optimal
      2. Persoalan yang terkait dengan prosedur operasional pelayanan di BPKAD eksiting diantaranya implementasi SOP pekerjaan BPKAD dan standar pelayanan belum optimal karena belum dilakukan evaluasi secara mendalam oleh bagian program BPKAD

1. **3.** Masih terdapat kesulitan pencapaian target inventarisasi data aset seutuhnya dari sisi aspek legal pensertfikasian tanah serta pemilahan data extracountable barang yang tidak termasuk kelompok data aset tetap

**3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru sesuai Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2017, maka Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu meneysuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, khususunya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2017-2022 adalah “MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA” yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi

Adapun Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Terkait dengan misi, pengelolaan keuangan dan aset daerah tercakup ke dalam misi ke 2 (dua) yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi **Pertama**, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. **Kedua**, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; **Ketiga,** perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintahan yang bersih (clean goverment), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

**3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dari tahun 2017-2022 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun kebelakang. Hal ini mengacu kepada apa yang telah dirasakan pada saat bagian keuangan dan bagian perlengkapan masih terpisah, yang menjadi dasar dalam menentukan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kelemahan**  **Faktor Internal** | **No.** | **Kekuatan**  **Faktor Internal** |
| 1.  2.  3. | Inventarisasi Aset Daerah  Pengukuran Kinerja Organisasi  Sertifikasi Keahlian Aparatur | 1.  2.  3. | Perda Organisasi BPKAD  Pemanfaatan Sistem Informasi  Sarana yang memadai |

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi tahun ke depan dari mulai tahun 2017-2022.

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama terpisah antara bagian keuangan dan bagian perlengkapan serta akhirnya pengesahan SOTK yang baru menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka dari hal tersebut terdapat peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi untuk tahun 2016-2017, yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | **Peluang Faktor Ekternal** | No. | **Tantangan Faktor Eksternal** |
| 1.  2.  3. | Peran BPKAD yang strategis Sebagai Lembaga SKPKD Tingkat Esselon II  Reward atas kinerja keuangan dari Pemerintah Pusat  Kemudahan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat | 1.  2.  3. | Berkembanganya tuntutan stakeholder akan kemajuan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah  Meningkatnya tuntutan stakeholder akan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah  Perubahan Peraturan Perundang-undangan |

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun ekternal, termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kota Cimahi, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan bisa optimal dicatat dan dialokasikan secara tertib, kemudian optimasi belanja daerah dapat dilakukan secara tepat serta kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu hingga pemanfaatan aset daerah dapat jelas berdaya guna terhindar dari idle asset yang tidak termanfaatkan secara baik oleh pengguna barang sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ota Cimahi.

**Pencermatan Lingkungan Internal dan Ekternal**

PLI PLE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kekuatan (S)** | **No.** | **Peluang (O)** |
| 1  2.  3. | Perda Organisasi BPKAD  Pemanfaatan Sistem Informasi  Sarana yang memadai | 1  2  3 | Peran BPKAD yang strategis Sebagai Lembaga SKPKD Tingkat Esselon II  Reward atas kinerja keuangan dari Pemerintah Pusat  Kemudahan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat |
| **No.** | **Kelemahan (W)** | **No.** | **Tantangan (T)** |
| 1.  2.  3. | Inventarisasi Aset Daerah  Pengukuran Kinerja Organisasi  Sertifikasi Keahlian Aparatur | 1  2  3 | Berkembanganya tuntutan stakeholder akan kemajuan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah  Meningkatnya tuntutan stakeholder akan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah  Perubahan Peraturan Perundang-undangan |

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis

faktor ekternal (KAFE)

**KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lingkungan** | **Bobot** | **Rating** | **Score**  **(bobot x rating)** | **Prioritas** |
| **KEKUATAN** | | | | | |
| 1 | Perda Organisasi BPKAD | 20 | 4 | 80 | I |
| 2 | Pemanfaatan Sistem Informasi | 15 | 4 | 60 | II |
| 3 | Sarana yang memadai | 15 | 3 | 45 | III |
| **KELEMAHAN** | | | | | |
| 1 | Inventarisasi Aset Daerah | 25 | 4 | 100 | I |
| 2 | Pengukuran Kinerja Organisasi | 15 | 3 | 45 | II |
| 3 | Sertifikasi Keahlian Aparatur | 10 | 2 | 20 | III |
| **Jumlah** | | **100** |  | **350** |  |

Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya Perda Organisasi BPKAD yang ditetapkan oleh Walikota menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah inventarisasi aset daerah, prioritas kedua yang kuat adalah pemanfaatan sistem informasi sedangkan untuk kelemahannya adalah pengukuran kinerja Organisasi. Prioritas kekuatan ketiga adalah sarana yang memadai sedangkan sertifikasi keahlian aparatur menjadi kelemahan ketiga dalam meningkatkan kemampuan pegawai.

**KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lingkungan** | **Bobot** | **Rating** | **Score**  **(bobot**  **x**  **Rating)** | **Prioritas** |
| **PELUANG** | | | | | |
| 1 | Peran BPKAD yang strategis Sebagai Lembaga SKPKD Tingkat Esselon II | 25 | 3 | 75 | I |
| 2 | Reward atas kinerja keuangan dari Pemerintah Pusat | 20 | 3 | 60 | II |
| 3 | Kemudahan berkoordinasi dengan Pemerintah  Provinsi dan Pemerintah Pusat | 10 | 1 | 10 | III |
| **TANTANGAN** | | | | | |
| 1 | Berkembangnya tuntutan stakeholder akan kemajuan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 20 | 3 | 60 | I |
| 2 | Meningkatnya tuntutan stakeholder akan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 10 | 2 | 20 | III |
| 3 | Perubahan Peraturan Perundang-undangan | 15 | 3 | 45 | II |
| **Jumlah** | | **100** |  | **270** |  |

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah peran BPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah , prioritas kedua dalam peluang adalah adanya reward atas kinerja keuangan dari pemerintah pusat namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah dan prioritas yang ketiga adalah kemudahan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Perubahan Peraturan Perundang-undangan.

**MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAFI**  **KAFE** | **Kekuatan (S)**   1. Perda Organisasi BPKAD. 2. Pemanfaatan Sistem Informasi. 3. Sarana yang memadai. | **Kelemahan (W)**   1. Inventarisasi Aset Daerah; 2. Pengukuran Kinerja organisasi. 3. Sertifikasi Keahlian Sumber Daya Aparatur. |
| **Peluang (O)** | **Strategi (S-O)** | **Strategi (W-O)** |
| 1. Peran BPKAD yang Strategis; 2. Reward atas kinerja keuangan daerah dari pemerintah pusat; 3. Kemudahan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. | 1. Melalui Perda BPKAD dibutuhkan **optimasi peningkatan pelayanan yang prima ke stakehoder terkait** 2. Melalui sistem informasi perlu adanya **Peningkatan ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Pemda**. 3. Dengan sarana yang memadai dapat mendukung **kerjasama dengan pihak kementerian dalam proses *transfer knowledge*** | 1. Peran BPKAD yang strategis diperlukan untuk **Menginisiasi penyusunan Perwal dan SOP Barang Milik Daerah** 2. **Melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait** agar kinerja BPKAD lebih meningkat. 3. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya** melalui program sertifikasi keahlian dengan lembaga maupun kementerian terkait. |
| **Tantangan (T)** | **Strategi (S-T)** | **Strategi (W-T)** |
| 1. Berkembangnya Tuntutan Stakeholder akan kemajuan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Meningkatnya tuntutan Stakeholder akan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah ; 3. Perubahan Peraturan Perundang-undangan. | 1. Dengan Peran BPKAD yang tertuang dalam Perda Organisasi maka dapat dilakukan **Rekonsiliasi Bersama Pengurus Barang di perangkat daerah secara rutin pada tahun berjalan**.      1. Memanfaatkan sistem informasi untuk **Mengembangkan aplikasi keuangan dan aset daerah yang mendukung data *real time* yang tepat dan akurat;** 2. **Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis** kepada para pejabat dan pengelola keuangan sesuai SOTK terbaru. | 1. **Menjalin kerjasama dengan tenaga ahli maupun berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait** dalam upaya *transfer knowledge* inventarisasi aset daerah 2. **Permohonan bantuan untuk implementasi pengukuran kinerja** kepada inspektorat dan bagian organisasi. 3. **Pengiriman aparatur keuangan daerah** untuk mempelajari dan memahami peraturan perundangan terbaru. |

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Factors Success*) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

**FORMULASI TUJUAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **FKK (CFS)**  **MISI** | **FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN**   1. Perumusan kebijakan teknis keuangan daerah. 2. Monitoring dan evaluasi pelayanan produk keuangan kepada stakeholder. 3. Tersedianya aplikasi keuangan dan aset yang telah terintegrasi. 4. Tingkat keberhasilan inventarisasi aset daerah yang efektif dan efisien. 5. Tingkat pemanfaatan barang milik daerah 6. Tersedianya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah. 7. Tingkat kemampuan kapasitas aparatur BPKAD. 8. Tingkat keberhasilan pengukuran kinerja organisasi BPKAD yang tepat. |
| 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif,efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. | **TUJUAN:**   1. Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah. |

Berdasarkan gambaran hasil analisa SWOT dan CFS maka mengerucut kedalam isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh BPKAD mengenai **belum** **optimalnya tata kelola keuangan dan aset daerah**, dengan beberapa faktor kunci yang mendukung isu tersebut dapat diselesaikan apabila monitoring dan evaluasi pelayanan produk keuangan kepada stakeholder dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan, serta didukung oleh aplikasi keuangan dan aset daerah yang telah terintegrasi dengan memilih metode inventarisasi aset daerah yang efektif dan efisien, dan hal tersebut perlu disampaikan kepada stakeholder melalui media sosialisai maupun bimbingan teknis yang tentunya bisa menggunakan narasumber yang ahli maupun oleh aparatur keuangan yang telah ditingkatkan kapasitas kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga atas semua pekerjaan yang dilakukan oleh BPKAD harus dilaporkan secara jelas dan terukur tingkat keberhasilannya.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan**

Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses *learning by doing* untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik . Tujuan Strategik tersebut yaitu Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah

**4.2. Sasaran**

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah optimalnya tata kelola keuangan dan aset daerah, yang dapat terukur melalui tingkat keberhasilan mencapai :

* + - 1. Penetapan APBD secara tepat waktu;
      2. Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan;
      3. Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Daerah.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-** | | | | |
| **1** | **Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah** | **Optimalnya tata kelola keuangan dan aset daerah** | **Penetapan APBD Tepat Waktu** | **Tepat Waktu** | **Tepat Waktu** | **Tepat Waktu** | **Tepat Waktu** | **Tepat Waktu** |
|  |  |  | **Kesesuaian Laporan Perangkat Daerah dengan SAP** | **Sesuai** | **Sesuai** | **Sesuai** | **Sesuai** | **Sesuai** |
|  |  |  | **Rasio Utilisasi Aset** | **40%** | **40%** | **50%** | **60%** | **70%** |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**4.6. Strategi**

**Strategi** yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan pemanfaatan sistem informasi dan sarana yang memadai.

Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya inventarisasi aset daerah dan sertifikasi SDM aparatur yang masih dibawah komposisi standar. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan aset serta transparansi pengelolaan keuangan daerah hingga implementasi peraturan pemerintah terbaru.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan yaitu ***“Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan barang milik daerah”***.

**4.7. Kebijakan**

**Kebijakan,** mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VISI : MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA** | | | |
| **MISI : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik** | | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| **Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah** | **Optimalnya tata kelola keuangan dan aset daerah** | **Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah** | **Penerapan Standar Operasional Prosedur** |
|  |  |  | **Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah** |
|  |  |  | **Pengendalian Anggaran** |
|  |  |  | **Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah** |
|  |  |  | **Penatausahaan Barang Milik Daerah** |

**BAB V**

**PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan organization progress.

**5.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program SKPD**

**1. Program peningkatan pengelolaan dan pengembangan keuangan daerah**

Pola kemitraan pemerintah dan stakeholder dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD.

*1.1 Penyusunan Standar Satuan Harga*

Sifat dan tujuan Program ini untuk menetapkan satuan harga tertinggi dalam penyusunan belanja daerah, dengan indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya kebutuhan harga dan spesifikasi barang sesuai dengan standar pasar yang direpresentasikan kedalam standar satuan harga dalam mendukung kegiatan di pemerintah kota cimahi.

*1.2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sifat dan tujuan Program ini untuk menghasilkan buku sistem dan prosedur keuangan pemerintah kota cimahi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru, dengan indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pedoman baku mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi para stakeholder pengelola keuangan di lingkungan pemerintah kota cimahi.

*1.3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD*;

Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib setiap tahun anggaran terkait penerbitan buku mengenai perencanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya penyusunan anggaran pemerintah kota cimahi yang tertib, transparan dan akuntabel

*1.4 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah Tersedianya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD.

*1.5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD*;

Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terwujudnya penyusunan anggaran perubahan pemerintah kota cimahi yang tertib, transparan dan akuntabel

*1.6 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD*;

Sasaran, tujuan dan arahan kegitan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

*1.7 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

*1.8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*

Sasaran, tujuan dan arahan kegitan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

1.9 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah;

Kegiatan ini mengarah kepada hasil kajian dari kerjasama pihak internal BPKAD bersama civitas akademi terkait keuangan daerah serta bentuk transparansi informasi berupa produk keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya informasi keuangan daerah bagi para stakeholder yang akurat dan real time.

1.10 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

Kegiatan ini mengarah kepada aplikasi yang digunakan oleh pemerintah kota cimahi dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya kesadaran pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi sistem informasi yang bersifat transparan dan akuntabel

*1.11 Peningkatan Manajemen Aset / Barang daerah*

Kegiatan ini mengarah pada inventarisasi dan pengamanan aset Pemerintah Kota Cimahi. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya Presentasi barang milik daerah yang tertib secara administrasi dengan pengelolaan aset yang akuntabel.

*1.12 Manajemen Investasi Daerah*

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya kajian investasi daerah.

*1.13. Pengendalian Anggaran*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya keselarasan anatara anggaran kas dan SPD yang telah diberikan oleh BPKAD selaku BUD kepada SKPD. Adapun indikator kegiatan ini adalah Terwujudnya Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah kota cimahi.

*1.14. Sinergisitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya tersedianya rekapitulasi laporan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi jawa barat. Adapun indikator kegiatan ini Tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel

*1.15. Penghapusan Barang Milik Daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian dan penghapusan pada barang milik daerah pemerintah kota cimahi. Adapun indikator kegiatan ini Tercapainya Presentasi Barang Milik Daerah yang tertib secara administrasi.

*1.16. Pemanfaatan Aset Daerah*

Sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini untuk mengakomodir usulan pemanfaatan aset daerah di kota cimahi dalam bentuk tim *ad hoc.*

*1.17. Pemanfaatan Barang Milik Daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah tersedianya data aset yang bisa dimanfaatkan apabila aset tersebut dalam keadaan menganggur. Adapun indikator kegiatan ini Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah

1.18. Optimasi Aset Daerah

Maksud Kegiatan ini adalah tersusunya dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah di pemerintah kota cimahi. Adapun indikator kegiatan ini Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah

1.19. Peningkatan Pelayanan Penatausahaan dan Perbendaharaan

Maksud Kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan penerbitan SP2D bagi SKPD dan pihak ketiga. Adapun indikator kegiatan ini Terbinanya para bendahara dan pengelola keuangan di setiap SKPD serta terwujudnya ketertiban administrasi penatausahaan daerah di Kota Cimahi.

**2. Program pelayanan Administrasi Perkantoran**.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalahterpenuhinya kebutuhan dasar operasional pendukung kegiatan BPKAD. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

*2.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;*

kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan pendukung layanan komunikasi dan internet sebagai penunjanga aktivitas operasional kantor.

*2.2 Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional/dinas;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.

*2.3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah*;

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengamanan asuransi pada kendaraan dinas di lingkungan BPKAD.

*2.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan;*

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan.

*2.5 Penyediaan alat tulis kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

*2.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

*2.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dn buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan.

*2.8 Penyediaan bahan logistik kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan logistik natura dan rumah tangga di lingkungan BPKAD.

*2.9 Penyediaan Makan dan Minuman;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD Badan Pengelolaan keuangan Daerah.

*2.10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.*

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

*2.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran*

Bentuk kegiatan ini mengarah pada tenaga harian lepas yang diperbantukan untuk membantu operasional kegiatan yang mendukung jalnnya aktivitas kantor.

**3. Program peningkatkan sarana prasarana aparatur**

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrai perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

*3.1 Pengadaan Kendaraan Operasional;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan BPKAD Kota Cimahi

*3.2 Pengadaan Meubeler;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan mebeuler sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

*3.3 Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya ketertiban dokumentasi arsip keuangan dan aset daerah dalam tempat yang aman.

*3.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan audio visual yang membantu dalam aktivitas pekerjaan rutin di lingkungan kantor BPKAD Kota Cimahi.

*3.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan BBM dan pemelihraan rutin kendaraan dinas BPKAD Kota Cimahi.

*3.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya pemeliharaan gedung dan alat pada gedung perkantoran BPKAD Kota Cimahi.

*3.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya meja dan kursi kantor serta alat meubeuler yang terkait dengan aktivitas kantor sesuai dengan umur ekonomisnya.

*3.8 Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang terkait dengan aktivitas kantor sesuai dengan umur ekonomisnya.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

*4.1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kapabilitas aparatur pengelola keuangan .

**5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator-indikator penghasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari program ini terdiri dari:

*5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalahTercapainya ketertiban penataan administrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelayanan hingga pelaporan dalam kerangka dasar berupa kebijakan dan laporan yang dapat mewujudkan peningkatan kinerja BPKAD;

*5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran*;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan keuangan periode semester yang akuntabel dan transparantif.

*5.3 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun*;

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun anggaran yang menggambarkan prinsip akuntansi pengelolaan APBD oleh SKPD selama satu tahun anggaran.

*5.4 Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan.*

Kegiatan ini mengarah pada peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur BPKAD dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

**5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD**

Program dan kegiatan ini dalam formulasi dan rancangannya melibatkan SKPD lain. Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2016-2017 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 5.2.1**

**PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **KEGIATAN** | **LINTAS SKPD** |
| Peningkatan dan  Pengembangan  Pengelolaan Keuangan  Daerah | * 1. Penyusunan standar satuan harga   2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD   3. Penyusunan Raperda tentang Penjabaran APBD   4. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD   5. Penyusunan Raperda tentang Penjabaran Perubahan APBD   6. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   7. Penyusunan Raperda tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan   9. Peningkatan manajemen aset/barang daerah   10. Sinergisitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan   11. Penghapusan Barang Milik Daerah   12. Jasa Administrasi Keuangan   13. Peningkatan Pelayanan Penatausahaan dan Perbendaharaan | Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi    Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi penerima bantuan provinsi jawa barat  Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi  Seluruh SKPD Kota Cimahi |

**5.3 Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan**

Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada SKPD BPKAD berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan Kota Cimahi yang tertuang dalam rumusan kebijakan RPJMD Kota Cimahi tahun 2012-2017, seluruh pendanaan program dan kegiatan pada SKPD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Untuk kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi harus disusun pula rencana pagu anggaran indikatif yang disusun berdasarkan kebutuhan penggunaan biaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.3

**BAB VI**

**PENUTUP**

Rencana strategik SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi 2016-2017 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kota Cimahi. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul presepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Rencana strategik yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari.

Cimahi,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI,

Dra. Hella Haerani

NIP. 19660214 199202 2 001